PERUBAHAN RENCANA KERJA

(RENJA)

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN

PERSANDIAN

KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2021



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN
2021

PERUBAHAN RENCANA KERJA

TAHUN 2021

(RENJA)

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN

PERSANDIAN

KABUPATEN PANGANDARAN



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN
2021



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Raya Parigi, Karangbenda Telp./Fax (0265) 7500518 Parigi 46393 email: kominfo.pangandarankab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR: 050 /01\$ -C/DKISP/2021

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, berkesinambungan dan bertanggung jawab maka perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah serta berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka Rencana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

- Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
- 20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

- Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 34. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

- Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
- 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
- 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
- 38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4);
- 41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24):
- 42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
- 43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
- 44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 70);
- 45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2017 Nomor 53);
- 46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

- 47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 67);
- 48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 42);
- 49. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021.

KEDUA

: Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

KETIGA

: Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. KEEMPAT

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi pada tanggal ²³ September 2021 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian

Kabupaten Pangandaran

IAJA NERULHUDA, ST., M.Dev.Plg

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19720106 199803 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Illahi Rabbi karena atas perkenan-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran dapat diselesaikan.

Perubahan RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk tahun 2021, yang disusun antara lain berdasarkan analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat pusat dan daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional. Selain itu, Perubahan RENJA ini juga disusun untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan / revisi muatan RENJA termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Parigi, 23 September 2021 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Kabupaten Pangandaran

SKOMINFO

JAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19720106 199803 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR	ISI		I
BAB I	PEN	DAHULUAN	1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	1
	1.3	Maksud dan Tujuan	6
	1.4	Sistematika	7
BAB II	EVA	ALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD.	8
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Triwulan II Tahun 2021	8
	2.2	Permasalahan Yang Ada Pada SKPD	12
BAB III	REN	NCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN	14
	3.1	Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021	14
BAB IV	PEN	NUTUP	16
	PEN	TUTUP	16
	ΙΔΝ	ADIR ANLI AMDIR AN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khusunya, dan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan dan rencana yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan diantaranya perkembangan kebutuhan organisasi.

Selanjutnya, dokumen Perubahan Renja Tahun 2021 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang kemudian akan dituangkan dalam rancangan APBD Perubahan (RAPBD Perubahan) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Renja Tahun 2021 adalah:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang

- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
- 20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 927);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 34. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24

- Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
- 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
- 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
- 38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4);
- 41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
- 42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
- 43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);

- 44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2019 Nomor 70);
- 45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2017 Nomor 53);
- 46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- 47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 67);
- 48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 42);
- 49. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 47).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ini disusun dengan maksud untuk menyelaraskan dengan dokumen Perubahan RKPD dan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun mulai dari bulan Januari s.d Desember 2021 dan dalam pelaksanaannya terdapat kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 adalah untuk:

- a. Penyelarasan dengan Dokumen Perubahan RKPD 2021;
- b. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan tahun 2021;
- c. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2021;
- d. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI,
	INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN SAMPAI
	DENGAN TRIWULAN II
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika,
	Statistik dan Persandian Tahun 2021 s/d Triwulan II
2.2	Permasalahan Yang Ada Pada SKPD
BAB III	RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1	Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021
BAB IV	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II ditujukan untuk mengidentiifkasi sejauh mana kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksannakan pada tahun berjalan atau tahun 2021.

Adapun evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran sampai dengan Triwulan II yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Penyusunan Dokumen Perenchaan Perangkat daerah dengan anggaran sebesar
 Rp. 22.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.800.000,- atau 47,78%. Sisa anggaran sebesar Rp. 11.800.000,-
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar
 Rp. 2.559.352.148,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.050.870.778,- atau 41,06%. Sisa anggaran sebesar Rp. 1.508.481.370,-
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 40.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.800.000,- atau 33,99%. Sisa anggaran sebesar Rp. 26.800.000,-
- Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD dengan anggaran sebesa
 Rp. 10.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.800.000,- atau 47,78%. Sisa
 anggaran sebesar Rp. 11.800,000,-
- Pelaporan Pengelolaan Rertribusi Daerah dengan anggaran sebesar
 Rp. 20.600.000,- dan terealisasi Rp. 10.200.000,- atau 49,51%. Sisa anggaran sebesar Rp. 10.400.000,-

- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp. 19.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.000.000,- atau 46,87%. Sisa anggaran sebesar Rp. 10.200.000,-
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp. 4.264.030,- dan terealisasi sebesar Rp. 685.000,- atau 16,06%. Sisa anggaran Rp. 3.579.030,-
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar
 Rp. 41.545.250,- dan terealisasi Rp. 9.689.500,- atau 23,32%. Sisa anggaran sebesar Rp. 31.855.750,-
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 6.505.650,dan terealisasi sebesar Rp. 1.955.700,- atau 30,06%. Sisa anggaran Rp. 4.549.950,-
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar
 Rp. 8.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.335.000,- atau 29,18%. Sisa anggaran Rp. 5.665.000,-
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.680.000,- atau 42,66%. Sisa anggaran Rp. 10.320.000,-
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 230.778.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.597.500,- atau 1,59%.
 Sisa anggaran Rp. 220.180.500,-
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar
 Rp. 110.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,- atau 90,90%. Sisa anggaran Rp. 10.000.000,-
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 7.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.045.500,- atau 28,02%. Sisa anggaran Rp. 5.254.500,-

- Penyediaan Jasa komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 58.191.552,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.938.787,- atau 30,82%.
 Sisa anggaran Rp. 40.252.765,-
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 127.381.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 58.303.500,- atau 45,77%. Sisa anggaran Rp. 69.077.500,-
- Penyediaan Jasa pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan
 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp.
 85.281.548,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.671.600,- atau 46,51%. Sisa anggaran
 Rp. 45.609.948,-
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan
 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.
 10.275.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.375.700,- atau 32,85%. Sisa anggaran
 Rp. 6.899.300,-
- Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 2.040.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. Sisa anggaran Rp. 2.040.000,-

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik dengan anggaran sebesar Rp. 27.904.974, dan terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0%. Sisa anggaran Rp. 0,-
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan anggaran sebesar Rp. 84.165.000,dan terealisasi sebesar Rp. 14.615.000,- atau 17,36%. Sisa anggaran
 Rp. 69.550.000,-
- Pelayanan Informasi Publik dengan anggaran sebesar Rp. 43.530.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.400.000,- atau 19,29%. Sisa anggaran Rp. 35.130.000,-
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dengan anggaran sebesar Rp. 1.371.844.948,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.543.046,atau 0,91%. Sisa anggaran Rp. 1.359.301.902,-

3. Program Aplikasi Informatika

- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub domain dalam
 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar
 Rp. 36.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.960.600,- atau 19,33%. Sisa anggaran
 Rp. 29.039.400,-
- Pengelolaan Pusat data Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar
 Rp. 144.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 71.992.800 atau 49,99%. Sisa anggaran Rp. 72.007.200,-
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan anggaran sebesar Rp. 91.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 55.800.000,atau 60,78. Sisa anggaran Rp. 36.000.000,-
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.137.643.780,- dan realisasi sebesar Rp. 65.181.761 atau 5,72%. Sisa anggaran Rp. 1.072.462.019,-

4. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Pangandaran dengan anggaran sebesar
 Rp. 952.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 952.000,- atau 100%. Sisa anggaran sebesar Rp. 0,-

5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan,Analisis dan Diseminasi
 Data Statistik Sektoral dengan anggaran sebesar Rp. 176.999.871,- dan realisasi
 sebesar Rp. 0,- atau 0%. Sisa anggaran Rp. 176.999.871,-

6. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar
 Rp. 95.313.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,- atau 12,59%. Sisa anggaran Rp. 83.313.000,-

3. Program Aplikasi Informatika

- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 36.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.960.600,- atau 19,33%. Sisa anggaran Rp. 29.039.400,-
- Pengelolaan Pusat data Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar
 Rp. 144.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 71.992.800 atau 49,99%. Sisa anggaran Rp. 72.007.200,-
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan anggaran sebesar Rp. 91.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 55.800.000,atau 60,78. Sisa anggaran Rp. 36.000.000,-
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.137.643.780,- dan realisasi sebesar Rp. 65.181.761 atau 5,72%. Sisa anggaran Rp. 1.072.462.019,-

4. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Pangandaran dengan anggaran sebesar
 Rp. 952.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 952.000,- atau 100%. Sisa anggaran sebesar Rp. 0,-

5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan,Analisis dan Diseminasi
 Data Statistik Sektoral dengan anggaran sebesar Rp. 176.999.871,- dan realisasi
 sebesar Rp. 0,- atau 0%. Sisa anggaran Rp. 176.999.871,-

6. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar
 Rp. 95.313.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,- atau 12,59%. Sisa anggaran Rp. 83.313.000,-

 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 19.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.000.000,atau 46,87%. Sisa anggaran Rp. 10.200.000,-

2.2 Permasalahan Yang Ada Pada SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran, tidak terlepas dari beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain :

- Adanya himbauan rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid sehingga terjadinya pemangkasan anggaran pada beberapa kegiatan.
- Kurangnya SDM yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian baik secara kuantitas maupun secara kualitas berakibat pada penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai target waktu, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan dapat terganggu.
- Terbatasnya sarana dan prasarana yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan dan kelancaran program/ kegiatan sesuai rencana. Kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan tergantung adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang menunjang.

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dinas Komuniaksi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkain cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukan adanya keterkaitan dan konsekuensi yang jelas sebagai suatu system operasional Dinas Komuniaksi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran. Kebijaksanaan, program dan kegiatan pembangunan dalam konteks organisasional Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dirumuskan melalui renstra organisasional Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dirumuskan melalui renstra

Pangandaran untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- Mengintegrasikan aplikasi di lingkup Kabupaten Pangandaran sehingga informasi yang disajikan berkualitas yaitu cepat, akurat dan relevan. Meningkatkan kemampuan dari sisi kapasitas dan ketersediaan layanan informasi;
- Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi,
 Informatika, Statistik dan Persandian;
- Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur melalui pengiriman pegawai dalam program dan kegiatan di tingkat provinsi maupun tingkat nasional;
- Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenganan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran;
- 5. Optimalisasi penggunaan anggaran;
- Menyusun dokumen perencanaan yang menjadi pedoman standar pelaksanaan tupoksi.

BAB III

RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021

Perumusan perubahan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 telah mempertimbangkan beberapa faktor dengan menyelaraskan tujuan, sasaran daerah dan sasaran instansi, peningkatakan kualitas pelayanan kedapada masyarakat untuk mencapai standar pelayanan minimal. Adapun perubahan program dan kegiatan tahun 2021 pada urusan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diarahkan untuk mencapai sasaran diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daereah Kabupaten/Kota

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD
- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemliharaan,Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Penyelenggaraan Hubungan Masayarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

3. Program Aplikasi Informatika

- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
- Pengtelolaan Pusat Data Pemerintahan daerah
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah daerah

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang penyusunannya

telah mengacu pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021. Penjabaran ini diharapkan dapat

menjadi pedoman perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran dalam Tahun 2021.

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan,

pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan

Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan

lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses

pembangunan pemerintah daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan,

pengendalian dan evaluasi kegiatan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini belum

sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam penyusunan

Rencana Kerja di masa mendatang akan lebih baik.

Parigi, 23 September 2021

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian

Kabupaten Pangandaran

AJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg

Pembina Tk. I, IV/b

NHP. 19720106 199803 1 002

rencana program dan Kegiatan Prionitas daerah Pada Perubahan RKPD tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Pangandaran

i	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikato	Indikator Kinerja Program/Keglatan/Sub Keglatan	Kegiatan		Target Kinorja	tinerja	Realisasi Angsaran Pada	Ange	Anggaran			
0	Program/Kegletan/Sub Kegletan	Indikator Kinerja Sebelum Perubahan	Indikator Kinerja Setelah Perubahan	Sebelum	Satuan Setelah Perubahan	Sebelum	Setelah Perubahan	Triwulan II/Semester I (Rp)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	seramban serkurang	Sumber Dana Lateran	
*	And contract	encomproducion habite en National Agentina contrata de Caracteria de Car	deing mystystisten kappelmatrian besonne de anterior anterior de a	S	9	7	-	projetiveurium kan eneriteri delmetran Azzerpatish de treatish enerite de training	10	secumental description of the secume	12	13	14
*4	Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian							1,617,916,772	5,797,489,503	5,276,802,379	(520,687,124)		
2	Urusen Pemerintahan Yang Tidak Borkaikan Dengan Pelayanan Desar							1,617,916,772	5,797,489,803	5,276,802,379	(\$20,687,124)		
8	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika							1,596,916,772	5,447,571,632	5,241,402,379	(206,169,253)		
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persontase serana prasarana Kantor yang terpanuhi, Persontase isporen kouangan dengan kualitas balk, Persentase personcanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas, Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Persentase serane prasarena Herkor yang terapenthi, Persentase laporan keuangan dengan kualitas balk, Persentase perencenaan dan evaluasi kinerja yang berkutilitas, Persentase peningkasen kompetensi	×	*	8	9	1,261,429,565	3,489,107,878	2,887,495,077	(599,612,801)		
es.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase perentenaen kinerja yang disusun lepet waktu, Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tapat waktu, Persentase dokumen evalussi yang disusun tepet waktu	Persentase perencanash Kinerja vyang disusun tepat waktu, Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu, Persentase dokumen welusi yang disusun tepat waktu	ж	*	8	9	10,800,000	37,000,000	21,000,000	(000'000'9)		
9	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daarah	Jumish dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat deerah yang tersusun	Dokumen	Dokumen	en	60	10,800,000	27,000,000	21,000,000	(000'000'9)	APBD	
7	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporen kinerja kouengan dengan baik	Persontase unit kerja yang menyusun leporen kinerja keuengan dengan baik	*	*	96	06	1,064,670,778	2,604,352,148	2,860,813,245	(243,538,903		
40	Penyediaan Gajî dan Tunjangan	Jumlah asn yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	Jumlah asn yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	Orang	Orang	50	50	1,050,870,778	2,559,352,148	2,336,813,245	(222,538,903	DAU	
ø.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi kauangan SKPD	Dokumen	Dokumen	62	ers	13,800,000	45,000,000	24,000,000	(21,000,000)	APBD	
10	Administrasi Berang Willk daerah pada Perangket deerah	Jumiah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi balk	Jumish berang milik deersh pade perangket deersh delem kondisi balk	- E	Calk	250	250	10,800,000	27,000,000	21,000,000	(000'000'9)		
11	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumiah barang milik daerah pada skpd yang dikelola	Jumiah barang milik daerah pada skpd yang dikelola	Janis Unit	Janis Unit	7	7 480	10,800,000	27,000,000	21,000,000	(000'000'9}	APBD	
12	Administrasi Pendapatan daerah Kowenangan Perangkat daerah	Persontase peningkaten retribusi yang diterima perangkat daorah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima perangkat deerah	×	*	ĸ	N	10,200,000	24,600,000	19,800,000	(4,800,000)		
13	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumiah pengelolaan retribusi yang dilaporkan	Jumfah pengelolaan ratribusi yang dilaporkan	Laporan	Laporan	rı	17	10,200,000	24,600,000	19,800,000	(4,800,000)	APBD	-
14	Administrasi Kapogawalan Perangkat deerah	Persontase administrasi kapegawalan perangkat daerah yang balk	Persentase administresi kepegawalan perangkat deerah yang balk	×	*	06	06	000'000'8	22,920,000	17,400,000	(8,520,000		
15	Koordinasi dan Palaksanaan Sistem Informasi Kepagawalan	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem infromasi kepegawalan yang dilaksanakan	Jumiah koordinasi palaksanaan sistem infromasi kepegawalan yang dilaksanakan	Kegiatan	Keglatan	ęn	en	000'000'6	22,920,000	17,400,000	(000'025'\$)	APBD	
16	Adminsitrasi Umum Perangkat daerah	Persentase administrasi umum perangkat deerah yang baik	Persontase administrasí umum perangket deerah yang balk	æ	×	06	8	32,942,700	340,297,630	94,784,980	(248,552,680)		
17	Penyedisan Komponen Instalasi Listrik/Penarangan Bangunan Kantor	Jumiah komponan instalasi Batik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi Ketik/penerangan bangunan Kantor yang disedlakan	Jenis	Jenis	64	re	000'599	4,264,030	988,000	(080'648'8)	APBD	

Properties and the properties	2	SEPS/Liciaes/Dideng Lician Pencefination Dasari des Program/Poglatar/Took Angrain (Pada DPA-Pennipat Dasar) Thum 1833	Indikater Kinarja Program (Churtema)/Roglatan/Sob Magi (Pada PDA Petenghat Ceerah Sahur 2022)	ob Kegistan (ourput) 3021)	Target Kinerja	dan Anggeran DPA Persngkat Dearsh 2021			Rasilessi K	Radibes Agnerja Pada Trimulan				Resilved Capalan Idn	Nasityesi Capalan Kinerja dan Anggaran Ranja Ferungkut Desrah	Theket Capalan Kinerja dan Rasilsasi Anggaran Renja PD	nelen sollsest nje PD	Ket
State Stat										-			IV			Telbon 2020 (%)	(3)	
Companies Comp			tridikator iOnerja	Satuan	Kinarja	No. of Street, or other Persons and Street, o	Igner)s	Romania	Kinerja	Rg Karana	Kinerja						Ap	
Companies Comp	T		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		and the state of t	S and an international property of the second		The state of the s			-00	雅	5				100	17
		Penalistakonaan dan Pengawasen Mama Domain dan Sub Domain dalam Pervelenggaraan	Jeniah damain yana bedalan	domain	1,00		1.00		1.00		1,00	Character	0000	1.00	the same and a	100,00		
		Pemerintahan Daerah Kabupatery/kota	Jumsh sub domain yang berjalan dengan balk	sub domain	30.00	36,000,000,00	20.00	3,346,000,00	20.00	3,634,600.00	20.00	D.		20,00	00'000'096'9	100.00	19.54	
Part	-	Pengelolaan L-Government di Inghay Penerintah Daerah Kabipaten, Kota	Persentasa OPD yang mamiliki layanan publik barbasa aldam elaktronik	introduction of the second	60.00	1,379,443,780,00	CONTRACTOR	78,999,876.00	macrasonarion formation formation	112,980,686,00	22,60	amounteed and a sound	Managaran	nontenental por	192,974,561.00	36.67	14.09	
Figure 6 that State Stat		Rightens vertical reactions assistance reaction of the Reaction between the contract of the Reaction between the	Juniah serser fisik pemerintah daerah yang diseksia	With the second	3.00	Anthonist contractions and and an a	3.00	an your your and an	3.06	as and and and	3.00	Arrandon de la company de la c	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	3,00	24 per and da	100,001	00 00	
Sample S		Poblancia Pubat, Lata Porietitianan Laetan	Jumlah apibasi yang tersimpan di pusat data pemerintah daorah	Shiem	970	344,000,000,00	8,00	23,096,490,430	9/00	35,856,900.90	90'9	PRINCIPLIA /	-	3.00	Section (Section)	100.00	Officer	
Particular Substant Substan			Cakupan implementasi proses banis berbasis elaktronik	persen	90'06	91,800,000.00	3.00	18,000,000,00	90%	37,800,000.00	10.00	4		9.00	55,800,000,000	10.00	60.78	
Including State 120 1137,541,761.00 150 113,597,771.00 150	-	AN REAL REAL AND AND THE STREET THE STREET AND	lumah abikasi yang dibembanakan	SCHOOL	900	O POST OFFI THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	3.06	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	3.00		3.00	THE PERSON NAMED IN COLUMN	The same of the sa	300	tridition interest of the contract of the cont	100.00	and an annual second	PHINANAMANA
State Part		Pengembangan dan Pengelotsan Sumber Daya Teknologi Informsi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah sumber daya TIK yang dilehola	sumber daya	1,00	1,157,643,780.00	1.00	25,997,475.00	1.00	39,184,286.00	1.00	٨		1.00	65,181,761.00	100.00	5.73	
Application 4.50 134,599,271.60 .<		URUSAN PIMERINTAKAN BIDANG STATISTIK									10000000000000000000000000000000000000		I					
Ages and the state of the countries 1.00 176,599,271.00 1.20,690,600.00 1.20,690,600.00 1.20,690,600.00 1.20,690,600.00 1.20,690,600.00 1.20,690,600.00 1.20,690,600.00 1.20		PROSEAM PRIVISENGARAM SERTISTIK SERTORAL	Persentata aubilitari data statistik sakumat		80.00	136,898,871.00												
Second conditional 2.00 136,599,871.00 1.00 136,599,871.00 1.00 136,599,871.00 1.00 136,599,871.00 1.00 136,599,871.00 1.00 136,599,871.00 1.00 136,599,871.00 1.00 136,599,871.00 1.00		Penyelengganan Statistik Saktorai di Lingkup daarah kobupatan/Kota	Justilah dokumantasi statistik saktoral yang disublikasikan	publikasi	1.00	176,999,871.00		•	•	•	٠	¥	•	•	*	- Contraction	*	THE STREET STREET
columnitation data statistics and statistic			Juniah koordinasi pemenuhan dan analisis data statistik sektoral OPO	ksordinasi	2.00	OW SAN STANCES OF STREET STREE	,		,					>		A Library Court of Auto-		
Factor Compared			umlah pengumpulan dan pengelohan data	dokumen	1,00	176,999,871.00			,	-					,	- Commission	*	-
Sample S	_		Umlah analisis dan diseminasi data statistik sektoral	dokumen analisis	1,00				,					,			-	- Commission
12 12 12 13 14 15 15 13 14 15 15 15 15 15 15 15						The state of the s												
with promised states 1, 1, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100		PRODEIN PROSESSESSES PERSONDIALUM PERSONAN PROPERTY	Persentan dalam latermasi dan dala etektrenti: Kana abian	*	10.00	114,413,600,00		34,890,690.09		6'500'005'0					91,690,690,69		18.30	
1,000,000,000,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000 1,000 1,000,000,000			Persentasa kaglatan pengamanan informed semerkish diserah	*	10.00	98,513,000.00		13,000,000.00		4		-	•		12,000,000.00		12.59	and the same and t
And arrise submentaled 1.00 1.000.000.00 1.00 1.00 0.000.000.0			unsiah apifinsi yang diuji keammannya, jumlah apifissi yang tersetifikasi elektronik	apilkasi	1.00	95,313,000,00	3.00	12,996,999.99	1.00	d.	1.00	5		1.00	12,000,000.00	100.00	12.59	
		setapan Pola Kabungan Kemunikasi Sandi Autar Perangkat Baerah Kabupatan/Keta	Burish prosedur konunikasi sendi antar assumblat dasarah sana ditusus	saluran komunikasi	1.90	19,300,000.00		3,800,000.00		6,300,000,00		•		3	9,000,000.00		46.88	
	- Contract	or process and a construction of the construct	Januah sandi dan materi sandi			19,200,000,00	100	00'000'008'2	1.00	6,200,000,00	100	VATORIAN CONTRACTOR		1.00	0,000,000,0	100,00	46 88	The same and



18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlangkapan kantor yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	Jenis	66	66	9,689,500	51,690,950	40,488,250	(11,202,700)	APBD	
				Unit	Unit	1	1						_
19	Penyediaan Peraletan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis	Janis	4	4	1,955,700	6,505,650	2,955,700	(3,549,950)	APBD	
20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumiah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	Jenis	3	3	2,335,000	8,000,000	3,776,000	(4,224,000)	APBD	
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jenis	Jenis	1	1	7,680,000	18,000,000	15,360,000	(2,640,000)	APBD	
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumiah rapat korodinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Jumlah rapat korodinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kegiatan	Kegletan	24	24	10,597,500	251,837,000	31,500,000	(220,337,000)	APBD	
				Laporan	Laporan	24	24						
23	Pengadaan Bareng Milik Daersh Penunjang Urusan Pemerintehan daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi	Persentase pengedaan barang milik daerah yang tercalisasi	%	%	90	90	100,000,000	110,000,000	100,000,000	(10,000,000)		
24	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah penyediaan gedung kentor	Jumlah penyadiaan gedung	Unit	Unit	1	1	100,000,000	110,000,000	100,000,000	(10,000,000)	APBD	
25	Penyediean Jasa Penunjang Urusen Pemerintahan Deerah	Persontase jesa penunjang urusan	Persentase Jase penunjang urusan pemerintahan yang	%	%	90	90	78,287,787	221,841,852	158,543,582	(63,297,970)		-
26	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	pemerintahan yang disediakan Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	Buah	Buah	40	40	2,045,500	7,300,000	3,640,000	(3,660,000)	APBD	-
27	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Ustrik	Jumish jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumiah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	Rekening	Rekening	3	3	17,938,787	58,191,552	41,856,582	(16,334,970)	APBD	-
				Bulan	Bulan	12	12						
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumleh jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Bulan	Bulan	12	12	58,303,500	156,350,000	113,047,000	(43,303,000)	APBD	-
				Orang	Orang	6	6					and the second s	No.
29	Pemeliheraen Berang Milik daereh Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarena yang baik dan layak fungsi	Persentase prasarana yang balk dan layak fungsi	%	%	90	90	44,722,800	105,096,848	94,173,300	(10,923,248)		
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kandaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumiah jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	Unit	2	3	39,671,600	85,281,548	82,820,600	(2,460,948)	APBD	
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Jumiah jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	Unit	2	2	3,375,700	10,275,000	7,427,700	(2,847,300)	APBD	
32	Pemeliharaen Peraletan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dikelola	Jumiah peraiatan dan mesin lainnya yang dikelola	Unit	Unit	20	20	1,675,000	7,500,000	3,925,000	(3,575,000)	APBD	
33	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi		Unit		1	•	at a second seco	2,040,000		(2,040,000)	APBD	
34	Program informasi dan Komunikasi Publik	Persentase teta kelola layanan infromesi publik,persentase teta kelola komunikasi publik	Persentase tate kelola layanen Infromesi publik,persentase tate kelola komunikasi publik	%	*	50	50	35,558,046	1,522,139,974	933,042,948	(589,097,026)		
35	Pongelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupatan/Kota	Persontase ketersediaan konton yang dipublikasikan,Persentase pengelolaan media massa dan lainnya	Persentase ketersediaan konten yang dipublikasikan,Persentase pengelolaan media masse dan	%	%	55	55	35,558,046	1,522,139,974	933,042,948	(589,097,026)		
36	Monitroing Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah opini dan aspirasi publik sesuai lingkup kominfo yang ditindaklanjuti		Opini dan Aspirasi	4	25	s		30,999,974		(30,999,974)	APBD	

6	
8	
8	
3	20
	=
	型:
8	
Ť.	

\$,800,000,00 \$1,543,046,00 \$1,543,046,00	\$400,000,000 00 \$2,00	1,400,000.00 12,20 196.00 196.	5,800,000.00 22,543,046,00 3,543,546,00	5,800,000.00 22,543,046,00 3,543,546,00	5,800,000.00 22,543,046,00 3,543,546,00	5,800,000.00 22,543,046,00 3,543,546,00	American American	w 5	5 . 8	2,690,000,00	12.00	43,530,000.00	48.00 3.00 3.00 3.00	informasi publik media	25.75	Protyronia Mortinada Futura. Protoch pagarana i Adjungam Navograbut, Naciki dan Yosektran Komunika. Pengundan Yanna Damatar yang tahah Disenghan dah Pamasintah Punat dan kub Demain di Ligjinga.
MARIA TO NO MARIA TRANSPORTATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	immensorial (III)	immenters/files/	1,000 proposed 1,000	1,000 proposed 1,000	1,000 proposed 1,000	1,000 proposed 1,000	A DO	- Tonas	2,800,000.0	d d	4.98	84,163,000.00	4.00	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	an uniquentiares es d'une à applique fontaine que propose de la présente de la company	Pengitteliaan Media Komunikaan Puthiki Pengatteliaan Informatika Komunikaan Puthiki Pengatteliaan Informatika Komunikaan Puthiki
тем (100 1) по току п	им иму в техностинизменти потражения в техностини в потражения в техностиния в технос	от при	TO THE TAXABLE PROPERTY OF THE	TO THE TAXABLE PROPERTY OF THE	TO THE TAXABLE PROPERTY OF THE	TO THE TAXABLE PROPERTY OF THE	1.00	-	ACANAMA GRANCESCONO GA	To the same of the	1.00	27,994,974.00	25,00	open and approximate	Junian open sur seprens penn yeng.	вине и портиненти при при при при при при при при при пр
5,200,000,00	39,358,046,00 36.00 x x 44.00 35,355,046,00	30,255,046.00 в т т л	30,388,046.00 30.000 a vision and a vision a	30,358,046.00 26.00	30,358,046.00 20,00	00'980'88E'08	dendibitoring retreatificacinated	9,309,090,00	9,200,000,0	1	NO STANSFORM THE	1,827,444,922,00	75.00	Management of the property of	Persentese Reteracionem Nortem years of	Репуснован інтонтва фан континва у гивах гентегіта Овета Каваралецувога
\$2,334,044.04 \$4.09	25,255,256,040,00	00.00 to wed \$16.00	- 60'98 00'986'88'	20.05 polestica	10.04 00.880,000	90.860,865,06		9,340,040,00	9,240,000,4			1,927,444,932,09	99.99	*	Persentasa Teo ketota layanan laformad publik	
4												2,040,000,00	1.00	unit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi	Реплейзичану неполизы сеспив, кансы сам выпушнап цангиу а
750,000,00 5.00 93,000.00	\$,00 92 \$,000.00 ". 1,675,000.00 ". 100.00 ". 1,675,000.00 ". 100.00 ". 1,675,000.00 ". 100.00 ". 1,675,000.00 ". 100.00 ". 1,675,000.00 ". 100.00	5,00 925,000.00 v. 10.00 v. 10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	and the same of th	750,000.0		5,00	7,500,000.00	20.00	unit	Jumish persistan dan mesin lainnya yang	Pemelikatam Perakitan dan Mesih Lahinya
1,996,500.00 2.00 2,379,200.00 2.00	2,00 2,279,200,00 2,00	2.00 2,79,200.00 2,00	2.00 2,279,200.00	2.00 2,279,200.00	2.00 2,279,200.00	2.00 2,279,200.00	2.00		1,096,500.0		2.00	10,275,000.00	2.00	With the second	onal Jumlah jasa pemeliharaan, bisya pomeliharaan pajak dan peritinan kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan yang disedakan	Perpetalan taa Prinelharan, Biya Penelharan, Pajat den Petitinen Kordavan Disa Operat aksi Lapangan
8,390,000.00 2.00 27,491,600.00 2.00 · 2.00 · 2.00 35,421,600.00 100.00 42.00	2.00 27,491,690,000 2.00 - 2.00 33,821,690,000	2.00 27,491,000.00 2.00 . 2.00	2.00 27,891,800,90	2.00 27,891,800,90	2.00 27,891,800,90	2.00 27,891,800,90	2.00	2	3,000,000,0	and the same of th	2.00	85,281,548.00	2.00	Milk	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendianan perorangan dinas atau bendanan dinas jabatan yang disedakan	телуусында кан этеленданан, мауж тетенулгана саят турк котаналап тетенандагылында кан Кандаган Ойна Байайал
30,095,000,09 4.00	1,00 30,005,000,00 4.00 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9,00 10,000,000 10,000,000 10,	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	- ALVERTON	19,176,500.0	The state of the s	THE PROPERTY OF THE PERSON OF	105,096,548.00	90.00	Sirginantinanin-damintalia	Persentase preservas yang balk dan layak tunga	Pemelharaan Barang Milk Dassah Pensulang Urusan Pemerhalahan Daerah
46,703,900,00 sourcement of the control of the cont	3,00 48,703,590,00 householder to be a constructive description of the constructive descriptin	9.00 (9.783,590.00)	6.00 40,703,500.00	6.00 40,703,500.00	6.00 40,703,500.00	6.00 40,703,500.00	6.00	and the same of th	17,600,000.0		9.00	127,381,000.00	6.00	pales	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediahan	Pertyadiaan Jasa Pejayanan Umum Kanter
8,38,95,00	10.0 9,681,836.00 consistence of the construction of the construct	аничности в предоставления предоста	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	TO MATERIAL TO	8,256,953.0	6 6	300 t	98,191,557.90	3.00	nejaadas	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan ligirik yang disadiakan	Penyediaan sasa Kornunikasi, Sumbet Baya Air dan Listrik
2,043,990.09 10.00 г. на принципринентальной принципринентальной принципринц	2,043,990.00 10.00 ,	30.00 30.00 до 30.00	2,045,506.00	2,045,506.00	2,045,506.00	2,045,506.00	avistovena a	70.5		ST. T. C.	enthernerstein von	7,300,000.00	40.00	hend	Jumlah jasa awat menyurat yang disediakan	Peryediaan Jasa Sura! Мелуита!
25,856,955,000 29,00 52,439,894,00 13.00	29,00 52,430,834.00 1.00	29,00 52,430,834.00 1.00	29.00 52,430,834.00 19.00	29.00 52,430,834.00 19.00	29.00 \$2,430,835.00 13.00	29.00 52,430,834.00	29.00		29,856,955.0		9.00	192,872,852.00	95.00	×	Persenters Java personjang urusan persenintahan	Penyediaan Jasa Penunjang Jursan Pemerintahan Daorah
, 1,00 100,000,000,00 100,00	1.00 100,000,000.00	1.00	1,00,000,000.50	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.50	100,000,000.50	100,000,000		1.00	110,000,000.00	1.00	unit	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Pengadaan Godung Kartor atau Bangunan Lainnya
2,8,000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	00.000 (18.6 t) (18.6	00.00 interpretation of the control	6.00 and an analysis and a second a second and a second and a second and a second and a second a	6.00 and an analysis and a second a second and a second and a second and a second and a second a	6.00 and an analysis and a second a second and a second and a second and a second and a second a	6.00 and an analysis and a second a second and a second and a second and a second and a second a	0.00	-	0,000,088,5	-	6.00	110,000,000,00	24.00	unite	yang diseknggarakan Jumish ketersadisen berant milik deorah	Ралуевиндунгаал гарык коотеплам санкталындан эксерт В Республика от открыты барык коотеплам санкталындан эксерт Республика барын барагы АМПК Орануй Распублик (уткан Републик) Орагик
1,00 7,660,000.00 1.00 · 1.00	100 1/680,000.00 1	1.00 7/580,000.00 1.00 *	3.00 7,680,000,000	3.00 7,680,000,000	3.00 7,680,000,000	3.00 7,680,000,000	3,00	and the same	Particular in the street of th	-	1.00	18,000,000.00	1.00	jenis	undangan yang disediakan	
у в в технология до солого в населения в	отналения общения в при в при	оснол госопозадативную на верхности в полителения выполнения выполнени	SERVICE CONTRACTOR SPIRIT VIOLENTINO CONTRACTOR CONTRAC	SERVICE CONTRACTOR SPIRIT VIOLENTINO CONTRACTOR CONTRAC	SERVICE CONTRACTOR SPIRIT VIOLENTINO CONTRACTOR CONTRAC	SERVICE CONTRACTOR SPIRIT VIOLENTINO CONTRACTOR CONTRAC	an estate metro company de	-	mananananananananananananananananananan	-	Apparellments Apparell	and an anticological desired and anticological desired anticological desired and anticological desired a	understanden er en	months and an annual and an annual and an	Juntah bahas bacasa dan peraturan secundang.	основникальных поливания поливания выстрання выправления поливания поливания поливания поливания выправления поливания выправления
		подаржения в пода	3,000 2,155,000,00	3,000 2,155,000,00	3,000 2,155,000,00	3,000 2,155,000,00	3.00	-	180,000	1	3.00	90 080 900 %	00.6	Albei Mannananananananananananananananananana	Sunk uredensity of urgines are suppressed to the suppressed of the	verinu-neetaanineetaanineetaanineetaanineetaanineetaanineetaanineetaanineetaanineetaanineetaanineetaanineetaanin Penyediaan Sarang Celakan dan Penyejandaan
BOOL 13.780.00 4.81.780.00 4.00 7.50	BOOL 1 X1.790.00 4.00 12.00 12.00 13	подативной подативности	3,00 8,00 1,515,760,00	3,00 8,00 1,515,760,00	3,00 8,00 1,515,760,00	3,00 8,00 1,515,760,00	No 8	-	AURIE TO THE SAME SERVICE STATES OF THE SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAM	1	3,00	NO ONE SIGN IS	1,00	Mak	installation metables etterenterenterenterenterenterenterente	роголивностинальный имперация предвада
6,889, VO.00 vocasion of control production of the control of th	COOK, 686, 6 Contraction of the	на при на при при на п	25.00 0,889,100,00 unus	25.00 0,889,100,00 unus	25.00 0,889,100,00 unus	25.00 0,889,100,00 unus	25.00	-	2,000,000,0	-	25.00	41,345,250.00	00.00	The second secon	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang	ненисания полька на применения выполнительной полька в п В предвада в полька в
685,900.00	2.00 (88),000.00	685,000.00						2.4	CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH	-	A Anthropiosistenano A Astronomorphismos	4,264,030.00	3.00	jenis unit	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disadiakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrib/Pensungan Banguran Kantor
21,582,780.00 25.00	21,582,780,00 35.00	21,182,780.00 35.00	21,182,700.00	21,182,700.00	21,182,700.00	21,182,700.00	and the second s	-	5,860,000.0	-	done contraction	309,092,930,00	95.00	*	Persentaa administrasi umum perangkat daerah Yana balk	Administrad Umum Peringkat Beersh
889 00'00 00 000 000'00 00'00 00'00'00'00'0	00,0000	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	-	2,800,000.0		3.00	00.000,005,81	3.00	Institut	Jumlah koordinasi pelaksansan sistem informssi kepegawalan yang dilaksanakan	Koordinad dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kopegawalan
9,000,000,00	3,00 6,200,000,00 5.00	3.00 6,300,000.00 3.00	3,00 6,300,000,00 3,00	3,00 6,200,000.00	3,00 6,200,000.00	3,00 6,200,000.00	3.00	-	2,800,000.0	donnous or o	and the second s	19,200,000.00	95.00	*	Perrentasa administrasi kopegowatan perangkat daerah yang balk	Administrasi Kapagawaian Perangkat deerah
3,500,000,000 1,000 7,000,000,000 100,0	1.00 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1.00 7,000,000.00 1.00 v	1.00 7,000,000.00	1.00 7,000,000.00	1.00 7,000,000.00	1.00 7,000,000.00	1.00	- Constitution	200,000.0	and the same of th	1.00	20,600,000.00	1.00	laporan	Jumah pengebaan setribusi yang dilaporkan	Pelaporan Pengololaan Betribusi Daerah
7,000,000,00 1.00	3,00 7,000,000,00 3.00	3,00 7,000,000,00 3,00 4	1.00 7,000,000.00	1.00 7,000,000.00	1.00 7,000,000.00	1.00 7,000,000.00	1.00	-	0,000.0		en-contraction of	20,600,000.00	5.90	*	Persentasa peningkatan retribusi yang diterima peranukat duerah	Adminstraal Pendapatan Deorsh Kewenangan Perengkat daerah
3,400,000.00 7,400,000.00 7,400,000.00 400.00 10,400,000.00 10,400,000.00 10,400,000.00 10,400,000.00	7.00 7.00 7.00,000.00 7.00 7.00 10,000,000.00 min	7,00 7,400,000,00 7,00 480,00 480,00	480,00 7,400,000,00	480,00 7,400,000,00	480,00 7,400,000,00	480,00 7,400,000,00	480.00	vomen	0.000.0	-	7.00 480.00	22,900,000.00	7.00	Mild Manager	Jumlah barang millik daerah pada SKPD yang dikebola	Psoatausitsian Barang Milik daerah pada SKPO
*	7,400,000.00 (co.co.2000). A processor to the contraction of the contr	7,400,000.00 7,400,000.00 Accessorates Acces	7,00,000,000,00	7,00,000,000,00	7,00,000,000,00	7,00,000,000,00	700	- Constitution	0.000.0	3,40	Manufacture von	23,600,000.00	250.00	Will warmen	Juniah barang milik duerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Administrasi Barang Milik Daerah pada Parangkat Daerah
2,50 10,400,500.50 2,50 - 2,50	2,00 10,400,000.00 2,000 - 1,000 13,900,000.00	2,50 10,400,500.50 2,50 - 2,50	2,50 19,490,000.56	2,50 19,490,000.56	2,50 19,490,000.56	2,50 19,490,000.56	2.00	-	,400,000.0	and the same of th	2.00	40,600,000.00	2.09	dokumen		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengudan/Verifikasi Keungan SCPO
20,00 367,386,386,00	20,00 \$67,386,386,00 20,00 r	20,00 367,386,386,00 20,00 r	20,00 367,386,386,00	20,00 367,386,386,00	20,00 367,386,386,00	20,00 367,386,386,00	29.00	anners and	3,484,392.0	- Charleston	20.00	3,569,352,148.00	00.02	grang otang	Juniah ASN yang dapat fisilitasi penyediaan gaji dan tuniahsan	ополительного полительного пол
22.00 97	23.90 977,786,866,00 22.00 · • • • •	23.90 977,786,866,00 22.00 · • • • •	23.90 977,786,386,00 22.00 .	23.90 977,786,386,00 22.00 .	23.00 977,786,386,00 32.00	22.00 877,786,386,00	22.90	- Annual	186,884,392.0	-	and and annual section of the	00.884,528,668,6	95,00	*	Personasa unit kerja yang manyusun laporan kinasik koosawan danasa hali	инивання положения п Administrati in automorphism (neurophism) положения по
3,400,000.00 3,00 7,400,000.00 3.00 · 7,000,00	00.000,008.01 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.	3.00 7,400,000,00 3.00 z	3,00 7,400,000.00	3,00 7,400,000.00	3,00 7,400,000.00	3,00 7,400,000.00	3.00		3,400,000.0	- Construction	3.00	22,600,000.00	3.00	dokumen	Jundah dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusuhan Dokumen Penekanahan Penakanahan
3,400,000.00	7,449,000.00	7,449,000.00						3,400,000.00	3,400,000.0			22,600,000.00	90.00	až.	1. Jurniah perencansan kinerja yang disusun Ingali yada 2. Periendasa dolumen penganggaran kine-ja 3. Perendasa dolumen evalusai yang disusus Tanat malau.	Perencensar, Penganggaran, dan Evalusi Kinada Peranguni Daerah
															4. Persennas Perencaman dec avaluas lidoerja vent berkvolften	
901/27/440.00 7E0/290/2E000 1/25/27/460.00	710,000,721.00	710,000,721.00						00.000,775,000	841,577,#46.0			00'947'979'69	84.00		ternanali. 2. Franciscos ispote saturque desgan basitos. balk.	PROBLEM REMAINS INVESTIGATION PROFESSION AND AND STATEMENT STATEMENT AND
													93.00		Park Attend Veneseed enemy ventable y	DIANA KRAHAKSA, JACKOMATINA, DENTENG KAN PERSANDIAN UNUSERA PERSENTAHAN WAND WANG TORAK BIRKATTAN CHICAGAN PELAYANAN DASAR UNUSERA PERMENINTAHAN BIDANG KORNINIKASI DAN HASOMBATINA
69 (Street) 14 (Street) 17 (Street) 18 (Street) 19 (St	through to through to through to through to through the through	the training the training the training the training to the training training the training tra	the their to their	Ideas)a Rp Ideas)a Rp	Idnerja Rp Idnerja	One in the contract of the con	Stanta		9,9	6	Kinarja	2 19	idnerje	Sarbass	Indificator Kinaria	
Asabased Capation (Strate) is read Thirection Asabased Capation (Strate) data Analysis of Management Tengle (Strate) data Analysis of Asabased Capation (Strate) data (Analysis Asabased Capation (St	Realised Capalon thing) dan Anggaren Renja Ferengkat Decoh	Taolit V	Taolit V	1	1	Realised Wrode Peda Tribritian	Analised Kiturja Pada Trisvisi II	-		-		Anggeren DPA Perangkas erek 2021	Target Kimarja dan Anggaran DPA Po Daerah 2021	ut Kegistan (output) (2021)	Indikator Idnat	Kodes 90/D/Linuxe/Mideng Linuxe Pennedrichen Dearth des Program/Rogbitze/Disk Kogkitze (Pida DPA Pennigkal Dearth Talum 2021)
Those Protes										The same			Compact Court Acres on special	STREET, SAN PROPERTY.		

-										MONTH TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PERSON OF	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	NONE DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CON	ратениченности
37	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumiah Media Online yang dikelola		Media	Media	1	1	14,615,000	87,340,000	52,917,000	(34,423,000)	APBD	
	, eillendische Litterinen in meile	Jumlah sosial media yang dikelola	Jumlah sosial media yang dikelola	Sosmed	Sosmed	4	4	8.436.2646000		THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT			
38	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah informasi publik yang	Jumiah informasi publik yang	Informasi Publik	Informasi Publik	48	48	8,400,000	53,800,000	16,200,000	(37,600,000)		
39	Penyalenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	disebariuaskan ke publik Jumlah hubungan dengan media yang terjalin	disebarluaskan ke publik Jumlah hubungan dengan media yang terjalin	Media	Media	3	3	12,543,046	1,350,000,000	863,925,948	(486,074,052)	PARAMETER STATE OF THE STATE OF	
40	Program Apilkasi Informatika	Tingkat kematangan tata kelola	Tingkat kematangan tata kelola	Indeks	Indeks	3	3	199,935,161	442,323,780	1,420,864,354	978,540,574		
****************	Pengelolean Nema Domein yang Telah di tetapkan oleh	SPBE Persentase domain yang	Persentase domain yang			AND WITH MARKET PROPERTY.	and the second s	MARKET CONTROL MARKET M		альшинго многоличного долиничного учество политочного стите		WICH AND THE POTT OF THE POTT	ST TOTAL PROPERTY AND
41	Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	terkelola, persentase sub domain yang terkelola	terkelola,persentase sub domain yang terkelola	%	%	100, 80	100, 80	6,960,600	36,000,000	36,000,000	`		
COMMON DESCRIPTION OF	TO A CONTROL OF THE C	Jumlah domain yang berjalan	Jumiah domain yang berjalan		ADVECTOR OF THE PARTY OF T	NORTH THE PARTY OF	THE REAL PROPERTY.	ERILANDE SOLVENSIA ELANA ARTONIO VIGENOUS CANADONES CANADONES CANADONES CONTRACTOR SONO CONTRA					
42	Penetalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	dengan balk	dengan baik	Domain	Domain	1	1	6,960,600	36,000,000	36,000,000		APBD	
	Kabupaten/Kota	Jumlah sub domain yang berjalan dengan baik	Jumlah sub domain yang berjalah dengan baik	Sub Domain	Sub Domain	20	20						
43	Pongelolsan ø-Government di Lingkup Pemerintah Daereh Kab/Kota	Persentase OPD yang memiliki leyenan publik berbasis sistem elektornik	Persentase OPD yang memiliki leyanan publik berbasis sistem eloktornik	*	%	60	59	192,974,561	406,323,780	1,384,864,354	978,540,574	emene cominante establishe	
44	Pengalolaan Pusat Data Pemerintahan daerah	Jumlah server fisik pemerintah daerah yang dikelola	Jumiah server fisik pemerintah daerah yang dikelola	Unit	Unit	3	3	71,992,800	144,000,000	144,000,000		APBD	
		Jumlah aplikasi yang tersimpan di pusat data pemerintah daerah	Jumiah aplikasi yang tersimpan di pusat data pemerintah daerah	Sistem	Sistem	5	5	antonionemonom ususiano contro enqualque triamono contro c					
45	Pengembangan Apilikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah implementasi proses bisnis berbasis elektronik	bisnis berbasis elektronik	Proses Bisnis	Proses Bisnis	10	10	55,800,000	109,800,000	109,800,000		APBD	
AND		Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Jumiah apilkasi yang dikembangkan	Sistem	Sistem	3	3						
46	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah daerah	Jumlah sumber daya TIK yang dikelola	Jumfah sumber daya TiK yang dikelola	Sumber daya	Sumber days	1	1	65,181,761	152,523,780	1,131,064,354	978,540,574	APBD & BANPROV	
47	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik							a	176,999,871		(176,999,871)	ACTURED TO THE PARTY OF THE PAR	
48	Program Ponyelenggaraan Statistik Sektoral	Persontase publikesi data statistik sektoral	A A	%		80	4		176,999,871		(176,999,871)		
49	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumentasi atatistik sektoral yang dipublikasikan	,	Publikesi	•	1			176,999,871		(176,999,871)		
		Jumiah koordinasi pemenuhan dan analisis data statistik sektoral OPD	a	koordinasi		2							
50	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statiatik Sektoral	Jumiah pengumpulan dan pengelohan data		dokumen pengumpulan	,	1			176,999,871		(176,999,871)		
		Jumlah analisis dan diseminasi data statistik sektoral		dokumen analisis	2	1			water personan naporano esta esta esta sus esta esta esta esta esta esta esta est			ADMINISTRATION OF THE PROPERTY	
51	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				and the state of t		-	21,000,000	172,918,000	35,400,000	(137,518,000)	SCHOOL STATEMENT OF THE	Name and Address of the Owner o
52	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			CHARLES AND	Notice that the second	CONTRACTOR DE CARGO D		21,000,000	172,918,000	35,400,000	(137,518,000)		and the same of th
53	Penyelenggeraan Persendian untuk Pengemanan Informesi Pemerintah Daerah Kabupsten/Kota	Persentase kegisten pengemanen Informasi pemerintah daerah	pemerintah deerah	%	%	10	15	12,000,000	149,998,000	18,000,000	(131,998,000)		
54	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang diuji keamanannya, jumlah aplikasi yang tersertifikasi elektronik	Jumiah aplikasi yang diuji keamanannya, jumlah aplikasi yang tersertifikasi elektronik	Aplikasi	Aplikasi	1	1	12,000,000	149,998,000	18,000,000	(131,998,000)	APBD	

5.5	Perangkat Deerah Kabupaten/Kota	andi enter perangket deerah ser	umlah prosedur kemunikesi andl anter perangket deerah ang disusun	Prosedur	Prosedur	1	1	9,000,000	22,920,000	17,400,000	(9,520,000)		
56	Daerah Kabupaten/Kota		umleh sendi den meterli sendi ang berjalan dengan baik	Saluran Komunikasi Sandi	Saluran Komunikasi Sandi	1	1	9,000,000	22,920,000	17,400,000	(5,520,000)	APBD	

Parigi, 2 September 2021

Kepala Olnas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian

Kabupaten Pangandaran Kabupa Kabupa STATISTIK LAMPERSANDAN JAJA NUROLI-JUDA: ST. M.Dev.Pla Peproina Tk./, IV/b MP. 19720106 199803 1 002